

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia termasuk Indonesia melalui PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 telah berkomitmen penuh terhadap pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) sebagai agenda yang bertujuan untuk pembangunan dunia untuk kemashlahatan manusia dan bumi. Didalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga dimensi yaitu berkelanjutan secara ekonomi (*economic sustainability*), sosial (*social sustainability*) dan lingkungan (*environment sustainability*). Ketiga dimensi tersebut memiliki bagian yang seimbang dalam menyumbang kualitas dari keberlanjutan (*sustainability*).

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Sektor perkebunan kelapa sawit ikut serta berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dari sisi ekonomi dapat dilihat dari kontribusinya terhadap devisa negara, berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2017) ekspor minyak sawit *Crude Palm Oil* Indonesia tahun 2017 mencapai 7,1 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 4,7 miliar, artinya terjadi kenaikan sebesar 33.96 % jika dibandingkan pada tahun 2016 yang baru mencapai 5,3 juta ton seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit (CPO) menurut Negara Tujuan (Ton) tahun 2016 - 2017

No	Negara Tujuan	2016	2017
1	India	2.948.981	4.627.682
2	Belanda	680.073	615.548
3	Singapura	580.472	604.711
4	Itali	250.384	356.503
5	Spanyol	236.855	215.685
6	Lainnya	587.188	655.940
	<b>Jumlah</b>	<b>5.283.953</b>	<b>7.076.069</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan merupakan integrasi dari pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Di dalam rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan terdapat pengintegrasian pemikiran ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok yaitu dimulai dari pembukaan lahan, panen, pengolahan, transportasi hingga pengiriman produk akhir sampai ke tangan konsumen akhir. Dengan kata lain dengan adanya rantai pasok kelapa sawit berkelanjutan selain menciptakan produk sawit yang efisien yang dapat meningkatkan perekonomian juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan pada generasi saat ini dengan tidak mengabaikan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Penelitian mengenai rantai pasok berkelanjutan kelapa sawit sudah banyak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani diantaranya (Paduloh, 2018) melakukan penelitian usulan perbaikan rantai pasok dengan menggunakan *Soft System Methodology* dimana menurut beliau dibutuhkan perbaikan terhadap infrastruktur untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit, jaminan terhadap harga jual TBS dan perbaikan kualitas SDM petani kelapa Sawit. Dalam penelitian (Paduloh, 2017) mengenai analisis luas lahan kelapa sawit menggunakan metode AHP terhadap risiko pelaku usaha dikemukakan pada level aktor, petani merupakan pelaku yang paling beresiko sedangkan pada level kriteria, risiko tertinggi adalah pada peningkatan jumlah pasokan sedangkan pada level alternatif adalah adanya risiko kualitas.

Penelitian terhadap kualitas telah dilakukan oleh (Hidayat, 2011) dimana dalam penelitiannya dengan menggunakan model identifikasi risiko dan strategi peningkatan nilai tambah pada rantai pasok kelapa sawit mendapatkan hasil bahwa bahan dan produk unggulan kelapa dibutuhkan adanya pemilihan strategi terhadap penggunaan bahan yang berkualitas dan penggunaan teknik budidaya dan produksi yang. (Hadiguna, 2013) dalam penelitiannya melakukan model penilaian risiko berbasis kinerja untuk rantai pasok kelapa sawit dimana dari hasil penelitiannya mengusulkan indikator - indikator kinerja yang bermanfaat dalam penerapan ISPO.

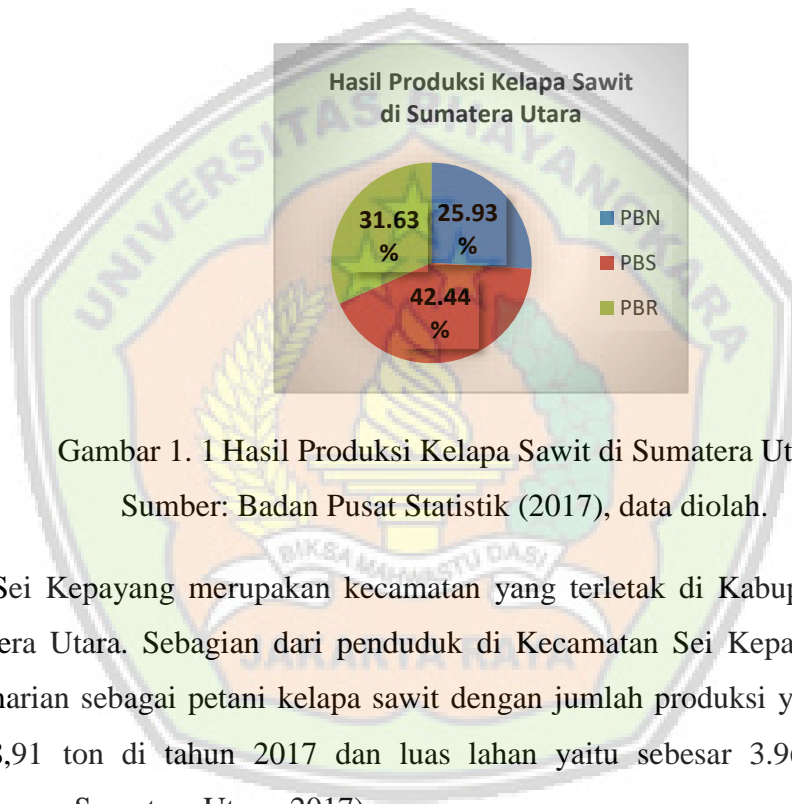
Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di bagian utara pulau Sumatra. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit dengan luas perkebunan kelapa sawit seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia menurut Provinsi 2017

No.	Provinsi	Luas Lahan (Ha)
1	Riau	2.260.941
2	Kalimantan Barat	1.503.058
3	Kalimantan Tengah	1.358.949
4	Sumatera Utara	1.348.305
5	Kalimantan Timur	1.047.090
6	Sumatera Selatan	1.021.255
7	Jambi	769.870
8	Kalimantan Selatan	480.004
9	Aceh	433.379
10	Sumatera Barat	402.130
11	Bengkulu	340.717
12	Bangka Belitung	245.100
13	Lampung	239.861
14	Sulawesi Barat	184.616
15	Sulawesi Tengah	184.198
16	Papua	132.846
17	Sulawesi Selatan	75.721
18	Sulawesi Tenggara	73.387
19	Kalimantan Utara	69.196
20	Papua Barat	63.690
21	Banten	19.478
22	Jawa Barat	15.904
23	Maluku	12.638
24	Gorontalo	8.374
25	Kepulauan Riau	7.743
<b>INDONESIA</b>		<b>12.298.450</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), data diolah

Seperti terlihat pada tabel 1.2 di atas, Sumatera Utara memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.348.305 Ha. Luas lahan tersebut terbagi atas 3 status pengusahaan yaitu Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas area pada masing - masing lahan adalah 316.508 Ha (23,47%) milik PBN, 562.921 Ha (41,75%) milik PBS dan 468.876 Ha (34.78%) milik PR (Badan Pusat Statistik, 2017). Dan berdasarkan dari data hasil produksi provinsi Sumatera Utara sebesar 4.144.620 Ton, sebanyak 25,93 % merupakan hasil dari PBN, sebanyak 42,44% hasil dari PBS dan 31,63% dari PBR (Badan Pusat Statistik, 2017). Seperti dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1. 1 Hasil Produksi Kelapa Sawit di Sumatera Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017), data diolah.

Sei Kepayang merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebagian dari penduduk di Kecamatan Sei Kepayang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dengan jumlah produksi yang mencapai 16.508,91 ton di tahun 2017 dan luas lahan yaitu sebesar 3.965 ha (Dinas Perkebunan Sumatera Utara, 2017).

Dalam wawancara yang dilakukan oleh (Paduloh, 2018) masalah yang terjadi di dalam rantai pasok kelapa sawit adalah :

1. Adanya ketidakstabilan harga jual kelapa sawit.
2. Adanya perbedaan harga antara petani, pengepul dan PKS.
3. Sulitnya infrastruktur diperkebunan kelapa sawit
4. Pengetahuan petani yang masih rendah dalam pemilihan bibit, pembelian pupuk, dan perawatan pohon dan lingkungan.

5. Pengetahuan petani yang masih rendah mengenai produk hilir kelapa sawit.
6. Kesadaran petani yang masih rendah mengenai upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Produktivitas Produksi yang tidak merata pada saat panen dan cenderung rendah.
8. Kualitas produk yang rendah.
9. Pembakaran hutan untuk lahan kelapa sawit baru.

Hal serupa juga didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kendala yang dialami oleh petani di daerah Sei Kepayang, Sumatera Utara. Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Purba dan Bapak Lani Tarigan terdapat perbedaan harga sawit yang ditetapkan Dinas Perkebunan dengan harga yang diterima petani dari pengepul dalam menjual TBS nya. Menurut beliau, harga TBS petani di pengepul ada selisih harga sekitar Rp. 160,-/Kg dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pabrik. Misal harga pabrik Rp. 1.020,-/Kg, harga di lapangan menjadi Rp. 860,-/Kg. Pendapat serupa juga diutarakan oleh para petani lainnya.

Adanya jaminan terhadap harga jual TBS dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani (Paduloh, 2018). Oleh karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perolehan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani dan menghindari adanya persaingan tidak sehat antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan penyimpangan harga oleh agen/pengepul, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mengeluarkan peraturan pemerintah no. 01 / PERMENTAN / KB.120 / 1 / 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Ruang lingkup peraturan ini meliputi penetapan harga pembelian TBS, syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan, tata cara pembelian dan pembayaran TBS, kewajiban Perusahaan Perkebunan dan pengawasan.

Di Sumatera Utara harga pembelian TBS ditetapkan 1 (satu) kali dalam tiap minggunya. Penetapan harga TBS di provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit

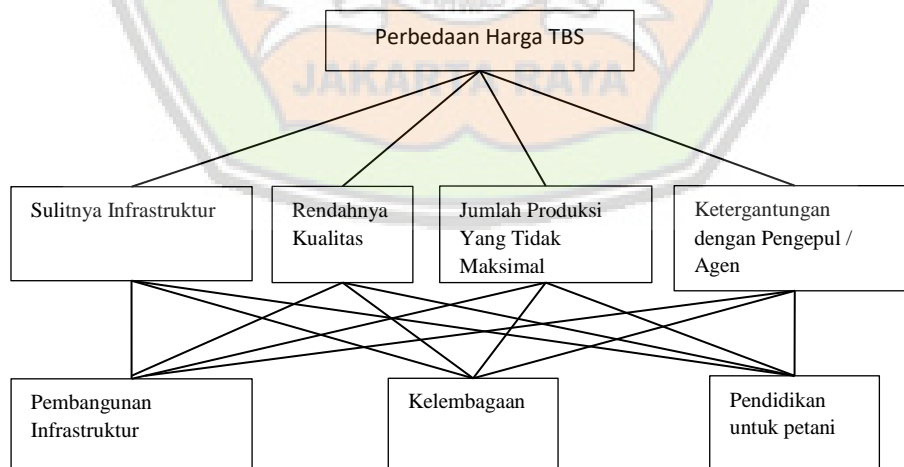
Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang kemudian harga TBS tersebut dikeluarkan melalui Dinas Perkebunan tiap periodenya.

Penyimpangan yang terjadi yaitu adanya selisih harga TBS antara Dinas Perkebunan dan Pengepul dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Perbedaan Harga TBS dari Dinas Perkebunan dan Pengepul dengan Umur Tanaman 10 Tahun

No.	Periode	Harga TBS (Rp.)		Selisih Harga (Rp.)
		Dinas Perkebunan	Pengepul	
1.	5 Januari 2019	1.492	1.349	143
2.	7 Februari 2019	1.548	1.388	160
3.	27 Februari 2019	1.490	1.328	162
4.	7 Maret 2019	1.506	1.371	135

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pakar dari permasalahan adanya perbedaan harga TBS tersebut dibuatkan struktur hirarki AHP untuk mencari alternatif pemecahan masalah dari adanya perbedaan harga TBS. Struktur hirarki AHP dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Struktur Hirarki AHP Perbedaan Harga TBS

Dari hasil pengolahan data AHP terhadap kuesioner yang diberikan didapatkan hasil seperti pada tabel 1.4

Tabel 1. 4 Hasil Pengolahan Data AHP Perbedaan TBS

Alternatives	Bobot	Rangking
Pembangunan Infrastruktur	0,1062	3
Kelembagaan	0,6588	1
Pendidikan untuk Petani	0,2151	2

Dari hasil pengolahan data didapat alternatif Kelembagaan memiliki bobot tertinggi yaitu 0,6588 maka alternatif yang dipilih dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan harga TBS adalah dibentuknya suatu kelembagaan petani.

Penelitian mengenai pentingnya kelembagaan telah dilakukan sebelumnya (Sabriyah & Kospa, 2016) dalam penelitiannya menjelaskan peran koperasi atau kelembagaan tani lainnya dapat membantu dalam hal pengembangan kelapa sawit perkebunan rakyat. Sedangkan menurut (Mulyana, 2007) petani perlu bergabung dalam suatu koperasi atau kelembagaan lainnya untuk memperkuat atau menyeimbangkan posisi tawar mereka

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dibutuhkan adanya kelembagaan untuk para petani di kecamatan Sei Kepayang, Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan perbedaan harga TBS tersebut.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana rancangan model kelembagaan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan perbedaan harga TBS di Sei Kepayang, Sumatera Utara ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat usulan rancangan model kelembagaan petani menggunakan *Interpretive Structural Modelling (ISM)* untuk mengatasi permasalahan perbedaan harga TBS.

#### 1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini diharapkan tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan untuk itu diberikan batasan - batasan masalah yaitu :

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
2. Pemodelan menggunakan *Software ISM*
3. Pemodelan dilakukan berdasarkan kelembagaan petani yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit di Sei Kepayang, Sumatera Utara
4. Penggunaan data - data sekunder pada penelitian diambil dari badan/lembaga/instansi resmi yang diakui secara nasional maupun internasional.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan model kelembagaan untuk petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani.

#### 1.7 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian dilaksanakan di :

Nama perusahaan : Perkebunan Kelapa Sawit

Alamat : Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

Waktu Pelaksanaan : Maret – Mei 2019



## 1.8 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data antara lain :

1. Observasi Langsung

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Wawancara Langsung

Melakukan wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak – pihak yang dapat memberikan keterangan dan bantuan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3. Data Sekunder

Data sekunder berupa provinsi penghasil kelapa sawit beserta kontribusinya terhadap total produksi, luas areal perkebunan kelapa sawit, data volume ekspor kelapa sawit, harga TBS per periode didapat dari data Badan Pusat Statistik 2017 dan Dinas Perkebunan Sumatera Utara.

4. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari sistem kelembagaan untuk agro industri.

## 1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi dasar – dasar teori dan metode yang dipergunakan sebagai dasar dan alat pemecahan masalah.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai metode atau cara dalam melakukan penelitian ini, mulai dari pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data hingga pada penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data serta analisa dan interpretasi.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi kesimpulan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran – saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

